

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰⁰ Bujur Timur – 114⁰⁴ Bujur Timur dan 7⁰ 12' Lintang Selatan – 8⁰⁴⁸' Lintang Selatan dan berada ujung timur pulau Jawa yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 47.963 km² yang banyak dikelingi pegunungan, sawah, dan hutan. Adanya banyak pegunungan menyebabkan daerah Jawa Timur berbeda satu sama lainnya. Bagian Jawa Timur sebelah barat merupakan daerah dengan keasrian yang masih terjaga baik dimana daerah ini terkenal dengan suasana pedesaan dan banyak lahan padi. Disisi lain, Jawa Timur bagian timur merupakan daerah dipenuhi tempat wisata kekinian diselingi beberapa keindahan alam. Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terbagi atas 38 kabupaten/kota, beberapa kota/kabupaten unggulan di Jawa Timur adalah Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Magetan, dan beberapa kabupaten/kota lain.

Provinsi Jawa Timur terkenal sebagai kawasan pertanian dan manufaktur yang terkenal di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Sektor pertanian dan manufaktur merupakan sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 30,60% dari manufaktur dan 11% dari sector pertanian, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur perlahan tumbuh sejak mengalami

penurunan pasca terjadinya pandemic covid. Ketika kejadian tersebut, hampir seluruh perekonomian di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan karena banyak pabrik dan petani yang kehilangan pembeli secara signifikan. Hal tersebut menjadi masalah untuk Jawa Timur yang mengandalkan sektor manufaktur dan pertanian.

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur juga terus meningkat secara perlahan dari tahun 2018 sebesar 2,33% dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,56%. Ini menunjukkan usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat. Adapun statistik jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sejumlah 4,2 juta jiwa, sekitar 10% penduduk miskin di Jawa Timur. Dimana angka ini terus mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini adalah gambaran hasil positif dari kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan daerah di Provinsi Jawa Timur baik dari segi ekonomi dan pembangunan. Sektor pariwisata yang sekarang menjadi jantung baru perekonomian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pembangunan dan pemeliharaan terhadap kawasan wisata kian diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah untuk menjaga keindahannya agar menarik datangnya wisatawan. Pengelolaan pedagang baik yang ada di kawasan wisata maupun perkotaan perlahan ditata dengan baik. Hal tersebut dilengkapi dengan menjaga dan melestarikan budaya sebagai daya tarik lain yang ditawarkan.

Pemeriksaan atau audit yang dilakukan BPK terhadap Provinsi Jawa Timur berjalan dengan transparan, akuntabilitas, dan efisien. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini bertujuan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah dan menilai efektivitas dan efisiensi anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah. Setelah dilakukannya pemeriksaan BPK akan memberikan opini dan hasil temuan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Provinsi Jawa Timur menyimak penyajian laporan keuangannya dengan baik. Disisi lain, jika dirinci terhadap kinerja setiap pemerintah daerahnya masih bervariasi dan ada yang belum stabil pada jangka waktu empat tahun terakhir walaupun secara opini terus mengalami kenaikan namun kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum dapat dikategorikan baik/tinggi secara keseluruhan. Temuan audit Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 temuan audit Provinsi Jawa Timur terdapat empat temuan, beberapa contoh temuan audit seperti kebijakan akuntansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kas, dan penyusunan laporan keuangan tahun 2018 belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut ditemukan karena kurangnya pemahaman atas kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2021 merupakan tahun yang berat setelah dilanda bencana pandemic covid-19. Namun pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur dapat mengatasi pandemi dengan baik sehingga temuan audit berkurang dari tahun sebelumnya. Fakta tersebut

menandakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap memperhatikan laporan keuangan tahun 2021 dengan baik sehingga tidak banyak temuan.

Provinsi Jawa Timur memperoleh mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan temua audit selama kurun waktu empat tahun terakhir. Dengan adanya penyajian tersebut maka kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan baik. Jika dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam empat tahun terakhir walaupun secara pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan dan temuan audit mengalami penurunan namun kinerja pemerintah daerah masih belum dapat dikategorikan baik/tinggi secara keseluruhan. Apabila kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur terus berada di posisi yang baik, maka masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur akan sejahterah. Kinerja pemerintah daerah yang baik adalah yang memperhatikan faktor-faktor penting untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Faktor-faktor yang di maksud adalah faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya.

B. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, temuan audit sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya yaituskor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil uji deskriptif pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LGP	40	3.0545	3.5868	3.247305	.1117047
EG	40	-6.46	6.51	2.9115	4.00674
AF	40	2.00	10.00	7.1250	1.57199
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1 rata-rata pertumbuhan ekonomi (EG) yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 2,9115, serta standar deviasi menunjukkan tingkat variasi atau variabilitas data sebesar 4,00674. Kabupaten yang memperoleh nilai minimum adalah Kota Batu pada tahun 2020, sedangkan untuk nilai maksimum diperoleh Kota Batu pada tahun 2019.

Temuan audit (AF) dalam penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 7,125 dengan standar deviasi 1,57199. Nilai maksimum pada penelitian ini dimiliki oleh Kota Madiun pada tahun 2019 yaitu sebesar 10,00 sedangkan untuk nilai minimum juga dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2021. Angka tersebut memberikan indikasi peningkatan kinerja yang cukup baik dilakukan oleh Kota Surabaya sehingga temuan audit bisa berkurang cukup signifikan.

Kinerja penyelenggaraan (LGP) memiliki rata-rata sebesar 3,247305 dengan standar deviasi 0,1117047. Kota Surabaya pada tahun 2021 memiliki nilai tertinggi atau maksimum sebesar 3,5868. Sedangkan nilai terendah atau minimum dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2021.

C. Pengujian Hipotesis

Alat uji yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Sebelum menguji pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependennya, diperlukan model regresi yang tidak bias sehingga diperlukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri atas 4 pengujian yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heteroskedasitisitas. Model regresi disebut tidak bias apabila telah memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi multikolonieritas dan heteroskedasitisitas.

2. Uji Normalitas

Penelitian dengan model regresi yang baik apabila seluruh datanya terdistribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Apabila nilai $-1,96 < Z \text{ hitung} > 1,96$, maka dapat disimpulkan data telah terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Uji Normalitas

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	40	.392	.374	.700	.733
Valid N (listwise)	40				

Sumber: data diolah tahun 2025

$$Z \text{ Skewness} = \frac{0,392}{\sqrt{6/40}} = 1,012$$

$$Z \text{ Kurtosis} = \frac{0,700}{\sqrt{24/40}} = 0,904$$

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.2 diketahui nilai Z hitung

untuk skewness sebesar 1,012 dan kurtosis sebesar 0,904 artinya nilainya memenuhi syarat $-1,96 < Z \text{ hitung} > 1,96$. Hasil tersebut menunjukkan data sampel yang di sampaikan pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

3. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya bebas dari asumsi multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi apabila nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 . Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 4.3:

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Varibel Penelitian	Tolerance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi	0,978	1,022
Temuan Audit	0,978	1,022

Sumber: data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada model regresi yang diuji pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini untuk membuktikan

ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* yang dilakukan dengan meregresikan antar variabel independen dengan nilai signifikan $> 0,05$, maka tidak akan terjadi masalah heteroskedastisitas. Tabel 4.4 adalah hasil uji heteroskedastisitas melalui uji *Geljser*

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Varibel Penelitian	Nilai Sig.
Pertumbuhan Ekonomi	0,802
Temuan Audit	0,212

Sumber: data diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.4 seluruh variabel independen mempunyai nilai signifikansi hitung (Sig.) $> 0,05$. Kesimpulannya adalah antar variabel independen dalam model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2017: 121). Uji Autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variabel yang saling berhubungan satu sama lain (Gani dan Amalia, 2015: 124). Hasil uji disajikan pada

tabel 4.5:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.027

Sumber: data diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.5 nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2.027 melebihi ambang batas atas yaitu sebesar 1.596 karena penelitian ini memiliki dua variable independent dan empat puluh sampel dan kurang dari $(4-dU) 4-1.596 = 2.404$. Maka hasil $dU < d < 4-dU$ yaitu $1.596 < 2.027 < 2.404$ tersebut dasar pengambilan keputusannya uji durbin watson tersebut disimpulkan tidak terjadi masalah ataupun gejala autokorelasi. Dengan hasil tersebut maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian dapat dilanjutkan.

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi dan temuan audit terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan koefisiensi tiap variabel independen, sehingga dapat diketahui tingkat pengaruh tiap variabel independen terhadap *variable* dependen. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.6:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.622	.734		.846	.403
PE	.078	.038	.314	2.048	.048
AF	-.119	.097	-.187	-1.224	.229

Sumber: data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui nilai koefisien dari persamaan regresi sebagai berikut:

$$LGP = 0,622 + 0,078 EG - 0,119 AF + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda menunjukkan seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,622 artinya apabila variabel pertumbuhan ekonomi dan temuan audit bernilai 0 (nol) atau tidak mengalami perubahan, maka kinerja penyelenggaraan akan mengalami kenaikan sebesar 0,622 kali dan berdampak pada kenaikan kinerja penyelenggaraan yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Variabel pertumbuhan ekonomi (EG) memiliki koefisien regresi sebesar 0,078 hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat satu kali maka nilai kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,078 kali dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Tanda positif berbanding lurus dengan hasil uji.

- 3) Variabel temuan audit (AF) memiliki koefisien regresi sebesar -0,119 yang artinya terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara variabel temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila temuan audit meningkat satu kali, maka nilai kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,119 kali dan begitu pula sebaliknya dengan asumsi variabel independen lainnya

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang besar akan menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengukuran koefisien determinasi didasarkan pada nilai *R Square* yang dihasilkan dari analisis model regresi linier berganda. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 4.7:

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.350 ^a	.151	.105	.96188957

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 nilai R Square yang dihasilkan sebesar 15,1%. Artinya, variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan temuan audit) dapat menjelaskan sebesar 15,1% variasi variabel dependen (kinerja penyelenggaraan), sementara sisanya sebesar 84,9% dijelaskan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan guna menguji hipotesis yang ada di dalam penelitian ini. Pengujian menggunakan α sebesar 0,05 menjadi probabilitas untuk menolak hipotesis yang benar. Jika nilai signifikansi dibawah 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan begitu pula sebaliknya. Hasil uji statistik t disajikan pada tabel 4.8:

Tabel 4.8 Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	.622	.734	.845	.403
EG	.078	.038	2.046	.048
AF	-.119	.097	-1.227	.229

Sumber: data diolah 2025

Berikut ini adalah interpretasi hasil uji berdasarkan tabel 4.8:

1. Nilai uji t variabel pertumbuha ekonomi (EG) sebesar 2.046 dan nilai signifikansinya 0,048. Nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, sehingga kesimpulannya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan.
2. Nilai uji t variabel temuan audit (AF) sebesar -1.227 dan nilai signifikannya adalah 0,229. Nilai signifikansi $0,229 > 0,05$, yang dimana temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

3. Uji Statitik F

Uji statistik F diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Probabilitas α sebesar 0,05 digunakan untuk menolak hipotesis yang benar. Jika nilai signifikansi dibawah 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan dan jika nilai signifikan diatas 0,05 maka varibel independent tidak berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen. Hasil uji statistik F disajikan di tabel 4.9:

Tabel 4.9 Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.886	2	2.943	3.288	.048 ^b
	Residual	33.114	37	.895		
	Total	39.000	39			

Sumber: data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.8, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,048. Nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, sehingga kesimpulannya adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan temuan audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

E. Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Penyelenggaraan

Hipotesis 1 (satu) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t, dimana pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t sebesar 2,046 dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan suatu pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah. Artinya, pertumbuhan ekonomi terdapat pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga H_1 diterima

Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal tersebut didapatkan karena dipengaruhi oleh tingkat investasi yang telah terealisasi secara optimal sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga didorong dengan infrastruktur serta sarana prasarana yang mumpuni untuk bisa menopang aktivitas ekonomi yang berjalan di suatu daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan asli daerah atas sektor tersebut dan mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik

Teori keagenan menggambarkan bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah, dimana masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agen yang menerima kepercayaan untuk menyediakan jasa mengenai kepentingan publik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu

penilaian kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam melaksanakan pembangunan nasional yang baik. Cara menjaga kepercayaan masyarakat pemerintah daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintah di daerah tersebut.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Panggabean (2017) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun peneliti menurut Martantri (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis 2 (dua) menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t, dimana temuan audit memiliki nilai signifikansi $0,229 > 0,05$. Artinya, tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan, sehingga H_2 ditolak. Nilai t sebesar -1,227 berarah negatif berarti semakin banyak jumlah temuan audit menunjukkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah namun pengaruhnya tidak signifikan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara mandiri. Seluruh sumber dana daerah akan dikelola oleh tiap pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Hal ini menjadi kesempatan untuk tiap daerah dapat berkembang secara mandiri, namun juga dapat menjadi peluang melakukan tindak kecurangan. Hal inilah yang mengharuskan adanya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan agar pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan yang diberikan sebaik mungkin dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK, salah satunya pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas baiknya pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam laporannya. Pemeriksaan kinerja akan memuat beberapa aspek, salah satunya temuan audit atas kelemahan SPI. Aspek SPI tentunya harus menjadi prioritas bagi setiap pemerintah daerah untuk dirancang dan dibentuk sebaik mungkin dengan berdasarkan pada standar yang berlaku. Karena SPI merupakan dasar pengelolaan yang dapat menggambarkan alur kinerja dari pemerintah daerah.

Temuan audit dalam penelitian ini merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK pada pemeriksaan terhadap

laporan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap ketentuan pengendalian internal. Pengaruh yang tidak signifikan dapat disebabkan karena temuan audit atas kelemahan SPI belum tentu dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam beberapa kasus kelemahan SPI akan menyebabkan peluang terjadinya kecurangan, namun tidak seluruh kasus kelemahan SPI akan berhubungan dengan adanya tindak kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Hal lain yang dapat menjadi penyebab pengaruh tidak signifikan ini adalah temuan audit ini tidak memperhatikan aspek pencapaian sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah namun hanya berdasarkan pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dinilai tidak sesuai secara peraturan namun jika dampaknya untuk kepentingan publik maka pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dengan baik melayani kepentingan publik. Hanya saja perlu perbaikan pastinya agar berjalannya pun dapat sesuai peraturan. Beberapa hal itu dapat menyebabkan tidak adanya pengaruh signifikan yang ditemukan.

Hasil dalam penelitian ini sama dengan penelitian Masdianti dan Erawati (2016) bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Tama (2018) bahwa temuan audit

berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin banyak temuan audit tidak dapat memberikan kepastian penuh gambaran bahwa hal itu menandakan buruknya kinerja pemerintah daerah.

